

## Perubahan Ekonomi Global dan Tantangan bagi Indonesia

Ignatius Ismanto & Roy Vincentius Pratikno

### **Abstract**

*The shifting of global political-economy since early 1990s has been followed by the expansion of regional economy cooperation forum establishment, such as: NAFTA (North America Free Trade Area), EFTA (European Free Trade Area) and APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Indonesia, together with the other South East Asia countries who join ASEAN (Association of Southeast Asia), is also actively involved in engaging regional economy cooperation forums, such as: ASEAN-China FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-Jepang Economic Partnership, ASEAN Regional Economic Partnership (ARCEP). The establishment of those economic regionalism is apparently a strategy in responding economical globalization. Indonesia's involvement in those regional economy cooperations has increased its national commitment, both in going through economical liberization as well as in building its national economy competitiveness. This research describes Indonesian political challenges in responding the dynamic changes of that global economy.*

*Keywords: economy globalization, regionalism and economy competitiveness.*

### **Pengantar**

Salah satu fenomena menarik yang menyertai perubahan ekonomi-politik global sejak berakhirnya Perang Dingin adalah berkembangnya regionalisme ekonomi yang ditempuh melalui pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional serta pelebagaan Free Trade Area (FTA) atau Regional Trade Agreement (RTA). Berbagai forum kerjasama ekonomi regional itu yaitu antara lain: EFTA (*European Free Trade Area*), NAFTA (*North American Free Trade Area*), serta APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*). Indonesia bersama dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN secara kolektif menjadi keanggotaan APEC, forum kerjasama ekonomi regional yang dibentuk pada 1989. ASEAN sebagai institusi regional yang dibentuk pada 1967 telah memainkan peran yang semakin penting seiring dengan perubahan ekonomi-politik di kawasan Asia Tenggara. ASEAN telah menjadi pendorong utama (*driving force*) pembentukan berbagai forum kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan kepentingan negara-negara besar, seperti: ASEAN-China, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea Selatan dan ASEAN-Autralian dan Selandia Baru. Bahkan, ASEAN berperan aktif dalam pembentukan RCEP (*Regional Cooperation Economic Partnership*), suatu forum kerjasama ekonomi regional terbesar.

ASEAN-pun semakin menyadari pentingnya integrasi ekonomi internal mereka, yaitu di kalangan ekonomi anggota negara ASEAN. Pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang dicanangkan pada 1 Januari 1991 dan realisasi pembentukan ASEAN Economic Community yang hendak dicapai pada 2015 menjadi strategi ASEAN dalam menghadapi perubahan ekonomi-politik global yang tidak menentu. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN sangat mendukung pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional itu. Bagi Indonesia, menjadi keanggotaan dalam berbagai forum kerjasama ekonomi regional itu membawa sejumlah harapan. Pertama, forum kerjasama ekonomi regional itu diharapkan dapat menjadi wahana kolektif dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang sarat dengan ketidak-pastian. Sehubungan dengan itu, pertimbangan Indonesia melalui ASEAN berperan aktif dan kolektif dalam pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional menjadi kajian yang penting. Kedua, keanggotaan dalam forum-forum kerjasama itu sekaligus akan dapat menjadi pemicu komitmen Indonesia dalam menempuh liberalisasi ekonominya. Liberalisasi ekonomi dipandang sebagai isu ekonomi yang strategis dalam mengatasi kesulitan ekonomi Indonesia, baik pada pertengahan 1980-an maupun 1997. Liberalisasi ekonomi juga menjadi isu ekonomi yang strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah perubahan ekonomi global yang semakin kompetitif. Namun, liberalisasi ekonomi itu juga sarat dengan dimensi politik. Liberalisasi ekonomi tidaklah dirumuskan dan diimplementasikan dalam ruang yang hampa politik. Liberalisasi ekonomi sebagai respon terhadap perubahan ekonomi global yang ditempuh Indonesia di tengah pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini merupakan isu yang menarik. Apakah tantangan liberalisasi ekonomi di tengah tantangan perubahan politik Indonesia dewasa ini?

### ***Perspektif tentang Globalisasi Ekonomi.***

Sejak 1 Januari 2014 sebanyak 581 usulan pembentukan FTA yang telah diajukan ke WTO, dan dari jumlah itu, sebanyak 377 telah direalisasikan ([www.wto.org](http://www.wto.org)). Pembentukan forum-forum kerjasama ekonomi regional mengalami peningkatan secara tajam, khususnya sejak pembentukan WTO pada 1994. Kedekatan geografis umumnya menjadi salah satu pertimbangan utama dari pembentukan forum kerjasama ekonomi regional itu. Pembentukan forum kerjasama ekonomi juga dapat terjadi antar negara pada kawasan yang berbeda, yang sering disebut dengan inter-regionalism. Pembentukan suatu forum kerjasama ekonomi melalui FTA atau PTA dimaksudkan untuk memperdalam proses integrasi ekonomi diantara anggotanya. Mengapa pembentukan PTA atau FTA memicu negara lain untuk membentuk PTA atau FTA yang lain? Alasan suatu negara untuk terlibat dalam berbagai forum kerjasama ekonomi regional melalui PTA atau FTA umumnya adalah untuk

menghindari perlakuan diskriminasi dari negara lain. Cohn (2010, 210-211) mengidentifikasi 5 (lima) tahapan dalam proses integrasi ekonomi suatu kawasan, yaitu: (i) Free Trade Area (FTA), (ii) Customs Union, (iii) Common Market, (iv) Economic Union, and (v) Political Union.

Pembentukan kerjasama ekonomi regional melalui FTA atau PTA merupakan tahapan integrasi ekonomi yang paling dangkal. Proses integrasi ekonomi selalu menuntut proses liberalisasi ekonomi di antara anggotanya. Dalam tahapan pembentukan FTA, misalnya, liberalisasi ekonomi itu diwujudkan dalam upaya penurunan atau penghapusan tarif terhadap sejumlah barang atau komoditi yang disepakati. Semakin dalam tahapan kerjasama ekonomi menuntut proses liberalisasi ekonomi yang lebih kompleks, yaitu tidak hanya sebatas pada pengurangan atau-pun penghapusan hambatan tarif, tetapi juga menuntut penghapusan hambatan-hambatan non-tarif. Penghapusan hambatan-hambatan non-tarif dalam kegiatan ekonomi umumnya merupakan proses yang lebih rumit, dan dapat memicu isu-isu politik yang sangat sensitif. Gagasan pembentukan forum kerjasama ekonomi regional tidak hanya memberikan perhatian pada isu-isu ekonomi, seperti: peningkatan arus perdagangan, investasi serta migrasi tenaga kerja. Motivasi di balik pembentukan forum kerjasama ekonomi regional itu sering kali juga tak dapat mengabaikan isu-isu politik-keamanan, seperti meningkatkan atau meluaskan pengaruh hingga melindungi keamanan nasional.

Pembentukan kerjasama ekonomi regional dapat menjadi batu loncatan (*stepping stone*) atau menjadi kendala (*stumbling block*) bagi globalisasi ekonomi. Globalisasi secara umum sering diartikan sebagai suatu proses dimana masyarakat dunia menjadi semakin terhubung (*interconnected*), antara satu dengan lainnya, dan proses itu menjangkau berbagai aspek kehidupan (ekonomi, politik, dan budaya). Globalisasi ekonomi sering dikaitkan dengan internasionalisasi proses produksi. Dalam pengertian ini, globalisasi ekonomi dipandang sebagai proses yang berada di luar jangkauan kontrol pemerintahan suatu negara. Globalisasi ekonomi dipandang akan mengaburkan batas-batas wilayah geografis suatu negara. Namun, globalisasi ekonomi itu tidak berarti akan melenyapkan keberadaan suatu negara. Sub-bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai perspektif, yaitu: Liberalisme, Realisme dan Strukturalis-Marxisme khususnya dalam memahami globalisasi.

Perspektif Realisme yang bertolak dari asumsi bahwa sistem global itu bersifat anarkhis selalu menekankan pada pentingnya peran negara sebagai faktor yang akan menentukan globalisasi ekonomi. Negara sebagai aktor utama dalam sistem global yang anarkhis itu, maka kalangan Realist percaya bahwa “*globalization increases only because states permit it to increase*”. Pemikiran Realisme ini berbeda dengan pemikiran Liberalisme yang memandang bahwa globalisasi ekonomi sebagai proses yang tidak bisa dihindari dan kecenderungan global yang tak bisa dicegah (*irreversible*

*trend*), sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Kalangan Realisme memberikan perhatian yang lebih utama pada isu-isu *power* dan *security* dan karena itu selalu menempatkan proses globalisasi ekonomi pada kepentingan nasional. Sehubungan dengan itu, kalangan Realist percaya bahwa “*stronger states can either open or close world market and can use globalization to improve their power position vis a vis weaker state*” (see: Cohn, 2008, p: 53). Suatu negara akan mendukung untuk terlibat dalam proses globalisasi, bila proses itu akan memperkuat kepentingan nasional negara tersebut. Sebaliknya, negara akan menghentikan proses globalisasi, bila globalisasi itu dipandang akan menjadi ancaman serius bagi kepentingan nasional negara tersebut

Perspektif Liberalisme bertolak pada asumsi bahwa sistem global bersifat harmoni, yaitu menguntungkan semua pihak, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Kalangan Liberal menganggap bahwa “*international economic interactions can be mutually beneficial, if they operate freely*”. Kalangan Liberal percaya bahwa kerjasama akan menguntungkan semua pihak. Meskipun keuntungan itu dapat bersifat asimetris, kalangan Liberal tidak terlalu mempersoalkan. Kalangan Liberal melihat bahwa kerjasama antar negara bersifat “*positive sum game*”. Berbeda dengan kalangan Realisme yang melihat bahwa dalam kerjasama dalam sistem global yang anarkhis bersifat “*zero sum game*”, yaitu menguntungkan satu pihak, namun pada saat yang sama merugikan pihak yang lain. Kalangan Liberal melihat bahwa globalisasi merupakan proses yang tidak bisa dicegah. “.....technological advances in transportation and communication and information processing are shrinking time and space so rapidly that governments can do nothing to stop globalization process (Cohn, 2008, p: 73). Pandangan Liberalisme ini berbeda dengan pandangan Realisme yang percaya bahwa globalisasi bisa dicegah, terutama bila negara menghendakinya. Kalangan Liberal melihat bahwa globalisasi “has constrained the role of state in certain economic areas and has forced it to vie (compete) with other significant actors”, seperti: MNCs, Organisasi Int’l dan NGOs.

Bagaimana kalangan Strukturalist-Marxisme dalam memahami globalisasi ekonomi? Kalangan Strukturalist melihat bahwa globalisasi ekonomi merupakan tuntutan perkembangan kapitalisme global. Dalam pemikiran Strukturalis-Marxist, sistem global bersifat konfliktual, yaitu sebagai pertarungan kepentingan kelas, *class-struggle*. Dalam pemikiran Strukturalist-Marxist, negara dipandang sebagai instrumen dari kekuatan sosial yang dominan. Kekuatan sosial yang dominan itu umumnya adalah kalangan pemilik modal (*the owning capital class*). Globalisasi ekonomi, dalam pemikiran Strukturalist-Marxist dipandang hanya akan memperkuat pengaruh kekuatan kapitalis global. Kalangan Strukturalist memiliki aspek kesamaan dengan Kalangan Liberal, khususnya dalam melihat bahwa kemajuan teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi globalisasi ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Liberalisme melihat kemajuan teknologi itu lebih

dipicu karena dorongan naluri manusia untuk kemajuan ekonomi. Sedangkan, Strukturalist-Marxist melihat kemajuan teknologi itu lebih merupakan tuntutan dari pembangunan kapitalisme global.

Ketiga persepektif yang beragam dalam memahami globalisasi itu diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam memahami perubahan ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara.

### ***Regionalisme Ekonomi ASEAN***

Asia Tenggara merupakan kawasan yang mengalami perubahan ekonomi yang dramatis, sejak Perang Dingin berakhir. Krisis ekonomi dan moneter yang menghantam kawasan ini pada 1997 menggoncang ekonomi sejumlah negara di kawasan itu. Namun, pemulihan krisis ekonomi itu telah mendorong kawasan Asia Tenggara bersama dengan sejumlah negara di kawasan Asia Timur menjadikan kawasan ini, dan diramalkan akan, menjadi motor atau penggerak pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia (1994) pernah menempatkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara bersama dengan sejumlah negara Asia Timur sebagai suatu kawasan yang mengalami keajaiban ekonomi. Perubahan ekonomi Asia Tenggara yang ditopang oleh kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan itu, serta letak geografisnya yang sangat strategis menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang diperebutkan kepentingan negara-negara besar. Sub bab ini mengkaji sejumlah isu yang menyertai perubahan ekonomi di Asia Tenggara. Bagaimana negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN menanggapi perubahan ekonomi global yang tidak menentu, khususnya sejak Perang Dingin berakhir? Apa yang melatar-belakangi ASEAN aktif membangun berbagai forum kerjasama ekonomi regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar, seperti: China, Jepang, Korea Selatan? Apa implikasi internal bagi negara-negara ASEAN seiring dengan semakin terintegrasinya ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu ke dalam sistem global yang semakin kapitalistik?

Latar-belakang sejarah merupakan aspek kajian yang penting dalam memahami perubahan ekonomi dan politik suatu kawasan. Ravenhill dalam Avila (2001) pernah menggambarkan bahwa Asia Tenggara sebagai kawasan yang '*deficit institutionalism*', yaitu kawasan yang dicirikan oleh terbatasnya kehadiran suatu institusi regional yang memfasilitasi kerjasama antar negara atau-pun masyarakat di kawasan tersebut. Kawasan yang miskin akan kehadiran institusi regional itu sangat dipengaruhi sejarah latar belakang perkembangan, yaitu persaingan kepentingan negara-negara besar di kawasan itu. Persaingan kepentingan negara-negara besar menjadi pemicu kelangkaan institusi regional itu. Sumber kekayaan alam serta letak geografisnya yang strategis telah menjadikan kawasan

itu menjadi arena pertarungan kepentingan negara-negara besar. China dan India, dua negara yang dimasa lalu menempatkan Asia Tenggara sebagai *back yard* untuk menopang kemajuan ekonomi mereka masing-masing. Sehubungan dengan itu, kedua negara itu selalu bersaing untuk memperebutkan pengaruh mereka di kawasan itu. Demikian pula kolonialisme yang mendorong bangsa-bangsa Eropa memperoleh bahan-bahan baku untuk menopang kemajuan industri dan ekonomi mereka menjadi kawasan ini terfragmentasi dan rentan terhadap konflik. Vietnam menjadi daerah koloni Perancis. Malaysia merupakan koloni Inggris. Philipina merupakan kolonis Spanyol. Demikian pula Indonesia menjadi daerah koloni Belanda. Persaingan negara-negara besar dalam mengamankan sumber-sumber kepentingan ekonomi mereka membatasi peluang bagi berkembangnya institusi yang memfasilitasi kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara. Demikian pula, pada masa Perang Dingin, Asia Tenggara menjadi arena perebutan pengaruh bagi negara-negara besar, yaitu kekuatan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Persaingan kepentingan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara itu merupakan faktor yang menjadikan kawasan itu rentan terhadap konflik.

ASEAN merupakan institusi regional yang pertama di kawasan Asia Tenggara. Organisasi regional yang didirikan pada 1967, yaitu pada masa Perang Dingin ini, awalnya hanya memfasilitasi kerjasama antar negara-negara yang berhaluan ideologi Anti-Komunis, yaitu: Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, dan Singapura. Bahkan, kelembagaan institusi regional itu dipandang sebagai instrumen bagi Amerika Serikat untuk membendung meluasnya pengaruh ideologi Komunisme di kawasan itu. Sekalipun, ASEAN merupakan forum kerjasama regional yang meliputi kerjasama ekonomi, kalangan pemimpin-pemimpin ASEAN awalnya sesungguhnya tidak pernah tertarik pada gagasan untuk mendorong integrasi ekonomi di antara anggotanya. ASEAN lebih merupakan kerjasama politik dan keamanan regional yang telah berperan penting dalam mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Gagasan untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan sesungguhnya merupakan ide yang baru, yaitu berkembang sejak Perang Dingin berakhir. Pembentukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang dicanangkan pada 1992 serta pelebagaan *ASEAN Economic Community* yang hendak direalisasikan pada awal 2015 merupakan komitmen yang dibangun kalangan pemimpin negara-negara ASEAN sebagai upaya memperdalam integrasi ekonomi mereka.

Sejak 1990-an, ASEAN sebagai institusi regional telah memainkan peran yang semakin aktif dalam pembentukan berbagai forum kerjasama regional. Pembentukan berbagai forum kerjasama regional (politik-keamanan serta ekonomi) telah menjadi instrumen kolektif bagi ASEAN dalam menghadapi perubahan ekonomi dan politik yang tidak menentu. Pembentukan ARF (*ASEAN*

*Regional Forum*) pada 1994 adalah suatu forum kerjasama politik-keamanan yang diharapkan mempertahankan kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia setelah Perang Dingin berakhir. ASEAN melihat pentingnya kehadiran Amerika Serikat dalam ikut serta mewujudkan stabilitas politik dan keamanan di kawasan itu. Pembentukan forum kerjasama regional yang melibatkan kehadiran dan kepentingan Amerika Serikat itu dapat dianggap sebagai strategi *bandwagoning* bagi ASEAN dalam menghadapi pengaruh China seiring dengan kebangkitan ekonominya. Kebangkitan Tiongkok dipandang sebagai ancaman bagi ASEAN. Sejumlah negara ASEAN memiliki sengketa teritorial dengan Tiongkok, yaitu Laut China Selatan. ASEAN sangat mengkhawatirkan Tiongkok dalam penyelesaian konflik teritorial itu, apalagi bila Tiongkok menggunakan kekuatan militer dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Bagi ASEAN, pembentukan ARF yang melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam forum itu menjadi forum dalam memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai.

Di samping kerjasama politik-keamanan, ASEAN-pun memainkan peran yang aktif dalam pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar. Pembentukan forum kerjasama ekonomi regional melalui ASEAN plus One, ASEAN plus Three dan RCEP (*Regional Cooperation Economic Partnership*) merupakan strategi ASEAN dalam menghadapi perubahan ekonomi-politik global yang tidak menentu. Pada 2004, ASEAN menjalin kerjasama ekonomi ASEAN dan China melalui ASEAN-China FTA (ASEAN-China Free Trade Area). Sejumlah kerjasama ekonomi regional yang serupa juga dibangun antara ASEAN dan Korea Selatan, yaitu melalui pembentukan ASEAN-South Korea FTA (AKFTA) pada 2006, ASEAN-Jepang melalui ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) pada 2008, ASEAN –Australia dan Selandia Baru melalui ASEAN\_Australia-New Zealand Free Trade Area (AANFTA) pada 2009, dan ASEAN dan India melalui ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) pada 2009. Kalangan pemimpin ASEAN menekankan pentingnya kolektivitas negara-negara anggota ASEAN dalam kerjasama ekonomi regional itu.

ASEAN sebelumnya dianggap sebagai instrumen negara besar, yaitu Amerika Serikat untuk mewujudkan kepentingannya, yaitu membendung meluasnya pengaruh Komunisme di Asia Tenggara. Kini, ASEAN telah memainkan peran yang semakin aktif dalam upaya menjaga stabilitas politik serta mewujudkan kemakmuran ekonomi di kawasan. ASEAN telah berubah, dan saat ini berkembang sebagai arsitek dalam pelembagaan forum-forum kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara, khususnya sejak Perang Dingin berakhir. Bagi kalangan Realist melihat bahwa pelembagaan kerjasama ekonomi yang dibangun ASEAN itu lebih merupakan strategi yang dibangun ASEAN dalam mendukung stabilitas politik-keamanan kawasan. Namun, kalangan Liberal selalu

menekankan pada pertimbangan ekonomi dalam setiap pembentukan forum kerjasama ekonomi yang dimotori oleh ASEAN. Pembentukan ASEAN plus Three yang melibatkan negara-negara Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok, misalnya, dipicu oleh pertimbangan ekonomi, seperti: memperluas akses pasar, meningkatkan arus perdagangan dan investasi. Sebaliknya, Realist melihat bahwa kerjasama ekonomi regional itu didorong oleh pertimbangan politik, yaitu menciptakan hubungan yang harmoni di antara ketiga negara yang saling bersaing. Demikian pula pembentukan *Regional Cooperation Economic Partnership (RCEP)* yang melibatkan 10 negara ASEAN serta 5 negara yang merupakan partner ASEAN, yaitu melalui ASEAN plus One, sesungguhnya dilatarbelakangi pertimbangan ekonomi dan pertimbangan politik.

RCEP merupakan kerjasama ekonomi kawasan dengan daya tarik ekonomi yang luar biasa. Kawasan dengan volume perdagangan yang besar, yaitu mencapai hampir 30 persen dari perdagangan dunia itu akan menjadi pangsa pasar terbesar, yaitu mencapai 45,4 persen dari pasar global. Kalangan liberal meyakini bahwa motivasi negara-negara ASEAN dalam menjalin forum kerjasama ekonomi regional itu adalah menghindari diskriminasi negara besar seiring dengan meningkatnya tekanan globalisasi ekonomi. Sedangkan kalangan Realist melihat pertimbangan politik-lah yang memotivasi dorongan ASEAN untuk membangun forum kerjasama ekonomi yang melibatkan kepentingan negara-negara besar. Motivasi politik utama di balik kepentingan ASEAN terlibat aktif dalam pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar itu adalah menghindari dominasi dan pengaruh negara besar. Dengan demikian, forum kerjasama ekonomi regional telah menjadi instrumen politik bagi ASEAN dalam mendukung stabilitas politik dan keamanan kawasan seiring dengan perubahan politik sejak Perang Dingin berakhir.

Meskipun pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional yang dibangun oleh ASEAN merupakan agenda politik untuk mendukung stabilitas politik dan keamanan kawasan, kekuatan ekonomi kiranya juga merupakan aspek yang tak dapat diabaikan oleh negara-negara ASEAN. Sehubungan dengan itu, bagaimana ASEAN secara kolektif maupun secara individual yang ditempuh oleh masing-masing negara ASEAN merespon globalisasi ekonomi merupakan fokus kajian berikut ini.

### ***Liberalisasi dan Daya Saing Ekonomi***

Salah satu tantangan bagi ASEAN dalam menjalin kerjasama ekonomi regional yang lebih luas adalah masih relatif lemah atau dangkalnya integrasi ekonomi internal di kalangan negara-negara



anggota ASEAN sendiri. Upaya untuk memperdalam integrasi ekonomi kawasan itu sebenarnya telah dirintis sejak awal 1990-an, yaitu dengan dicanangkanya pelaksanaan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tabel 1 menggambarkan prosentase volume perdagangan antar negara ASEAN pada 1998 sebesar 21 persen dari seluruh perdagangan global, dan pada 2011 meningkat menjadi 25,4 persen. Walaupun ada kemajuan dalam peningkatan perdagangan antar negara ASEAN selama lebih dari satu dasawarsa, peningkatan prosentase volume perdagangan itu dipandang masih relatif kecil. ASEAN lebih tergantung pada negara-negara di luar ASEAN dalam perdagangan internasionalnya. Berbeda sekali dengan integrasi ekonomi di Uni Eropa yang telah mencapai lebih dari 70 persen. Soesastro (2004, hal. 8) menilai bahwa rendahnya volume perdagangan antar negara ASEAN itu pula yang mendorong ASEAN lebih memilih konsep regionalisme yang terbuka (*open regionalisme*) dalam membangun kerjasama ekonomi regionalnya. ASEAN tidak menginginkan bahwa kerjasama ekonomi regional yang mereka bangun itu akan menjadi blok perdagangan yang tertutup.

**Tabel 1: Perdagangan antar ASEAN (1998-2011)**

|                      | 1998<br>(US \$ million) | 2003<br>(US \$ million) | 2009<br>(US \$ million) | 2011<br>(US \$ million) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total Trade          | 567,108                 | 824, 539                | 1,536,878               | 2, 045, 731             |
| Intra-ASEAN Trade    | 120,918                 | 206,732                 | 376, 177                | 519,865                 |
| Share of Total Trade | 21%                     | 25%                     | 24,5%                   | 25,4%                   |

Kalangan pemimpin ASEAN membangun kembali komitmen mereka untuk memperdalam integrasi ekonomi ASEAN, yaitu melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN<sup>1</sup>. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan tahapan integrasi ekonomi yang lebih dalam dibandingkan dengan pembentukan ASEAN Free Trade Area. Pembentukan Masyarakat Ekonomi

<sup>1</sup> Dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu pada 2007, kalangan pemimpin ASEAN menyepakati "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*".

ASEAN dimaksudkan untuk membangun pasar bersama (*Common Union*) bagi negara-negara ASEAN. Proses integrasi ekonomi menuju tahapan pasar bersama ini selalu menuntut negara anggotanya untuk tidak hanya sekedar menurunkan hambatan tarif tetapi juga menghapuskan hambatan non-tarif. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini memiliki tujuan yang strategis, yaitu: (i) mewujudkan kawasan ASEAN sebagai *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal), (ii) menjadikan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM); (iii) membangun suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI). Terbangunnya masyarakat ekonomi ASEAN itu dapat menjadi pemacu menuju integrasi pada ekonomi global, yaitu melalui keikutsertaan dalam *global supply network*.

Gagasan pembentukan forum kerjasama ekonomi regional ASEAN melalui pencanangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat dipandang sebagai upaya kolektif yang dibangun oleh negara-negara ASEAN dalam menyikapi globalisasi ekonomi (Soesastro, dkk., 2005: 181). Pemimpin ASEAN meyakini bahwa upaya secara kolektif dalam menyikapi globalisasi ekonomi itu akan lebih memberikan manfaat bagi negara-negara ASEAN daripada menempuhnya dengan menggunakan pendekatan secara individual oleh masing-masing negara ASEAN. Soesastro (1995: 319-320) menggambarkan bahwa “*ASEAN is too big, but too small*”. ASEAN dipandang terlalu besar, terutama dilihat dari latar belakang dan keragaman kondisi ekonomi masing-masing negara ASEAN, termasuk di lihat dari tahapan kemajuan ekonominya yang berbeda. ASEAN terlalu kecil, terutama dilihat dari efektivitasnya dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang tidak menentu. Sehubungan dengan itu, strategi kolektif yang dibangun ASEAN dalam menyikapi globalisasi ekonomi akan memberikan *bargaining power* bagi ASEAN, terutama dalam menghadapi kepentingan negara-negara besar.

Kerjasama ekonomi regional ASEAN, yaitu melalui pembentukan ASEAN FTA (AFTA) serta upaya untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada awal 2015 merupakan upaya kolektif ASEAN dalam meningkatkan daya saing ekonomi kawasan. Apakah pembentukan FTA dan MEA akan mendorong apa yang disebut “*trade creation*”, atau sebaliknya justru memicu “*trade diversion*” -merupakan salah satu isu yang penting bagi ASEAN dalam mewujudkan daya saing ekonomi kawasan. Trade diversion (pengalihan perdagangan) secara umum dapat diartikan sebagai penggantian produk domestik atau barang impor dari suatu negara dengan produk impor yang lebih murah dari negara anggota yang lain. Dalam pembentukan FTA dengan penurunan tarif atau

pemberlakuan tarif preferensial, harga suatu barang dari sesama anggota FTA akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga barang yang berasal dari negara yang bukan anggota FTA, walaupun biaya produksi barang tersebut sebenarnya lebih murah. Dalam praktek perdagangan internasional, pengalihan perdagangan (trade diversion) dipandang negatif karena hanya akan menurunkan kesejahteraan global. Sebaliknya, trade creation (penciptaan perdagangan) yaitu peningkatan perdagangan yang dipicu karena efisiensi biaya produksi, peningkatan perdagangan itu terjadi antar sesama anggota FTA maupun bukan anggota FTA. Trade creation membawa dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan global. ASEAN berharap pembentukan FTA serta MEA akan mendorong trade creation, bukan hanya pengalihan perdagangan. Sehingga upaya kolektif ASEAN dalam membangun FTA atau MEA dimaksudkan menjadi Asia Tenggara sebagai kawasan ekonomi yang menarik dan berdaya-saing internasional yang tinggi.

Peran aktif ASEAN dalam pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional serta komitmennya dalam memperdalam integrasi ekonomi internal di kalangan anggota-anggotanya telah membawa implikasi yang luas, yaitu dorongan untuk membangun kebijakan liberalisasi ekonomi bagi anggotanya. Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN menyikapi globalisasi ekonomi dengan menempuh kebijakan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi itu dipandang sebagai kebijakan strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi bagi negara-negara ASEAN. Setiap negara ASEAN telah menempuh kebijakan liberalisasi ekonomi itu dengan kecepatan yang berbeda-beda. Sejumlah pengalaman menunjukkan bahwa implementasi kebijakan liberalisasi ekonomi tidak-lah berlangsung dalam ruang politik yang hampa. Berbagai kelompok kepentingan yang dirugikan akibat kebijakan liberalisasi ekonomi selalu menjadi tantangan serius. Mereka ini umumnya adalah pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan penyelenggara negara. Mereka memperoleh perlakuan khusus karena koneksi politik dengan penyelenggara negara, dan karena itu mereka selalu berusaha untuk mempertahankan perlakuan khusus itu. Mereka ini-lah yang sering disebut dengan kalangan “pemburu rente” (*rent seeking activities*). Sehubungan dengan itu, liberalisasi ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menertibkan praktek-praktek perburuan rente (*rent-seeking activities*) dalam ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi, pengertian “rent” secara umum dapat diartikan sebagai penghasilan (*income*) seseorang di luar batas-batas kewajaran umum. Rent bisa diperoleh dari berbagai sumber, yaitu: (i) temuan baru (inovasi) yang memberikan imbalan (*reward*) yang menggiurkan bagi penemunya, (ii) berbagai insentif ekonomi yang diberikan oleh pemerintah (negara) sebagai manifestasi kebijakan ekonomi yang protektif terhadap sektor atau industri yang baru berkembang (*infant industry*), dan (iii) penghasilan yang diperoleh dari praktek-praktek kejahatan atau perbuatan

yang melanggar hukum, seperti: pencucian uang (*money laundering*), penjualan obat-obatan terlarang, hingga perdagangan manusia (*human trafficking*). Sehingga rent dapat diperoleh secara legal maupun dapat diperoleh secara illegal. Mengingat bahwa rent itu menggiurkan maka setiap orang akan berusaha untuk memperoleh dan atau mempertahankannya. Kegiatan ekonomi rente berkembang seiring dengan kebijakan insentif yang diberikan pemerintah (negara) dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Kebijakan ekonomi ini seringkali ditempuh oleh negara berkembang pada tahap awal pembangunan ekonomi dan industrialisasi mereka. Kebijakan pemerintah dalam pemberian berbagai insentif ini juga dipandang sebagai bentuk proteksi ekonomi dan industri selama dalam tahap awal industrialisasi.

Kalangan Realist lebih jauh memandang bahwa kebijakan ekonomi yang protektif atau-pun intervensi pemerintah dalam ekonomi itu dimungkinkan, atau bahkan sangat diperlukan bagi negara berkembang, terutama untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi (*economic backwardness*) serta mengatasi keterlambatan industrialisasinya (*late industrialization*). Gerschenkorn (dalam ? ) mengemukakan bahwa “semakin terbelakang ekonomi suatu negara serta semakin terlambat industrialisasi negara itu, semakin diperlukan peran dan intervensi negara yang lebih besar dalam ekonomi untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi serta keterlambatan industrialisasi”. Rent seeking activities berkembang seiring dengan intervensi negara untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi serta mengejar keterbelakangan ekonomi. Kebangkitan ekonomi sejumlah negara Asia Timur ditopang oleh rent-seeking activities. Peran dan intervensi negara dalam ekonomi telah mendorong proses akumulasi kapital yang luas biasa. Pembangunan kapitalisme di Asia Timur dimungkinkan karena peran dan intervensi negara, atau yang lebih sering populer dengan sebutan kapitalisme negara. Pemberian insentif ekonomi serta kebijakan ekonomi yang intervensionis itu telah memungkinkan tumbuh dan bangkitnya kekuatan kapital. Namun satu hal yang penting untuk dicatat bahwa pemberian insentif serta kebijakan ekonomi yang protektif itu sifatnya hanya sementara (*temporary*) saja, yaitu selama industri itu dalam tahap awal perkembangan (*infant industri*).

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa intervensi negara dalam ekonomi merupakan salah satu elemen yang kuat dalam sentimen nasionalisme ekonomi, terlebih di masa awal kemerdekaan 1950-an hingga 1980-an. Kebangkitan kembali gagasan untuk mewujudkan peran dan intervensi negara (pemerintah) dalam ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru Soeharto dimungkinkan oleh meningkatkan kemampuan finansial negara seiring dengan melimpahnya penerimaan devisa negara dari ekspor migas awal 1970an hingga pertengahan 1980-an. Meningkatnya kemampuan finansial negara itu memungkinkan negara untuk membiayai industrialisasi yang diarahkan negara (*state-led industrialization*). Berbagai kebijakan insentif

ekonomi untuk mendukung proteksi ekonomi, serta ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama periode itu telah memungkinkan proses akumulasi kapital yang luar biasa, yaitu lahirnya pengusaha nasional yang besar (Robison, 1986). Namun, ironi bahwa pemberian kebijakan insentif itu yang seharusnya bersifat sementara, yaitu selama masih dalam tahapan infant industry, justru semakin melembaga. Serangkaian kebijakan liberalisasi ekonomi yang telah ditempuh Indonesia sejak pertengahan 1980-an tidak mampu mengendalikan praktek-praktek perburuan rente. Bahkan dalam ekonomi Indonesia yang telah berubah, yaitu dengan semakin terintegrasinya ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi regional dan global, rent-seeking activities telah berpotensi menjadi sumber-sumber penyalah-gunaan kekuasaan, yang akan semakin melemahkan daya saing ekonomi nasional.

### ***Otoritarian, Krisis Ekonomi dan Demokrasi***

Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada 1997 dan berkembang menjadi krisis ekonomi yang lebih luas memang dapat dipandang sebagai salah satu dampak dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi selalu membuka peluang tetapi sekaligus tantangan bagi semua negara. Apakah setiap negara dapat meminimalisir dampak negatif dari globalisasi ekonomi atau mengoptimalkan peluang globalisasi ekonomi merupakan tantangan nasional bagi setiap negara. Aspek lain yang menarik untuk menjadi bahan renungan yaitu bahwa krisis moneter 1997 itu sesungguhnya tidak hanya persoalan ekonomi, yaitu penurunan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Krisis moneter 1997 juga memiliki dimensi politik, yaitu melemahnya kepercayaan masyarakat, termasuk masyarakat ekonomi internasional terhadap regim yang berkuasa. Apa yang bisa dipetik dari krisis ekonomi yang dialami pada pertengahan 1980-an maupun 1997?. Serangkaian kebijakan liberalisasi ekonomi Indonesia telah memperdalam integrasi ekonomi Indonesia ke dalam ekonomi regional serta ekonomi global. Namun, Indonesia kurang mampu mengelola dengan baik dampak dari globalisasi ekonomi itu, yaitu dengan semakin terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Perubahan ekonomi Indonesia belum diikuti perubahan politik yang berarti, khususnya dalam mengendalikan praktek-praktek perburuan rente. Rent seeking activities justru berkembang menjadi sumber penyalah-gunaan kekuasaan seiring dengan ekonomi Indonesia yang telah berubah itu.

Indonesia tidak mampu membangun kelembagaan ekonomi pasar yang diperlukan untuk mendukung dampak dari perubahan ekonominya. Lembaga ekonomi yang dimaksud disini adalah aturan serta norma-norma yang diperlukan dalam pengelolaan ekonomi serta mekanisme dalam

menegakkan aturan itu. Pelembagaan aturan-aturan dalam pengelolaan ekonomi yang lebih transparan sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang baru. Kelembagaan ekonomi yang transparan ini diharapkan menggantikan praktek-praktek tradisional dalam pengelolaan ekonomi, yaitu yang lebih mengacu pada patrimonialisme dan koneksi politik. Pada saat ekonomi Indonesia masih relatif tertutup, yaitu pada 1970an-1980-an, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memperkuat legitimasi kekuasaan dan karena itu, tidak menggoyahkan pola patrimonialisme dan koneksi politik dalam mendistribusikan 'rent'. Namun, sering dengan liberalisasi ekonomi dan investasi yang mendorong proses internasionalisasi kapital, yaitu semakin terjalinnya hubungan antara kekuatan kapital nasional dengan kekuatan kapital internasional, pola-pola lama, yaitu patron-klien dan koneksi politik tidak lagi relevan untuk dipertahankan dalam pengelolaan ekonomi Indonesia yang telah berubah.

Krisis ekonomi 1997, bagi kalangan Liberal, dipandang sebagai *blessing in disguise*. Krisis ekonomi ini mengisyaratkan pentingnya Indonesia untuk lebih serius dalam menertibkan kegiatan perburuan rente. Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis politik itu pada akhirnya melemahkan legitimasi regim yang berkuasa, serta mendorong perubahan politik yang lebih luas, yaitu demokrasi. Hanya dengan perubahan politik yang demokratis akan memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia dalam membangun penyelenggaraan kekuasaan yang lebih transparan. Demokrasi memberikan peluang dalam mewujudkan apa yang disebut *good governance*, yaitu pengelolaan kekuasaan yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan. Sejak 1998, Indonesia telah menempuh liberalisasi politik yang luar biasa, mengakhiri sistem pemilu dan kepartaian yang hegemonik, serta membuka partisipasi masyarakat dalam proses politik untuk mengakhiri sistem kekuasaan yang sentralistik, yang dipandang sangat rentan terhadap penyalah-gunaan kekuasaan.

Kalangan Liberal melihat bahwa liberalisasi politik telah membawa sejumlah perubahan penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelembagaan gagasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat yang pertama kali ditempuh pada 2004 semakin memperkuat kelembagaan demokrasi presidensial. Presiden tidak lagi mudah dijatuhkan oleh parlemen sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali bila presiden itu melakukan pelanggaran hukum. Pelembagaan itu diharapkan dapat mewujudkan stabilitas pemerintahan. Liberalisasi politik juga telah membuka ruang kebebasan yang lebih besar, dan karenanya memungkinkan proses pemilihan umum yang lebih kompetitif. Pelembagaan sistem demokrasi-presidensiil yang mulai diperkenalkan sejak 2004 dan diikuti menguatnya sistem multi-party cenderung menghasilkan *minority-government* yang berpotensi melemahkan stabilitas pemerintahan. Apa yang dimaksudkan dengan *minority government* itu adalah presiden yang meraih dukungan mayoritas suara dalam pemilihan presiden secara

langsung, tetapi tidak memiliki dukungan politik yang cukup kuat dalam parlemen. Pemerintahan Jokowi-JK merupakan contoh untuk menggambarkan fenomena minority government itu. Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam pemilihan presiden 2014 yang lalu meraih kemenangan mutlak, yaitu meraih suara lebih dari lima puluh persen<sup>2</sup>, namun pemerintahan Jokowi-JK itu tidak memiliki dukung politik yang kuat di DPR. Minority government ini tidak hanya dialami oleh pemerintahan Jokowi-JK, tetapi juga dialami oleh Pemerintahan Sby-JK (2004-2009), serta pemerintahan Sby-Budiono (2009-2014). Minority government yang berlangsung di tengah tajamnya fragmentasi politik dalam parlemen berpotensi memicu instabilitas pemerintahan. Manuver untuk membangun koalisi dalam pemerintahan-pun bukan persoalan sederhana. Bahkan, dalam sistem kepartaian yang dilanda oleh persoalan finansial partai (Tomza dalam Aspinall dan Mietzner, 2010: 147-149) pembentukan koalisi sangat rentan terhadap maraknya politik transaksional bagi kepentingan penggalangan pendanaan partai. Berbagai kasus penyalah-gunaan kekuasaan yang melibatkan sejumlah anggota parlemen dengan pejabat birokrasi pemerintahan tak lepas dari latar-belakang dinamika perkembangan politik itu.

Meskipun Indonesia telah mengalami perubahan politik yang dramatis sejak 1998. Kalangan Strukturalist-Marxist melihat perubahan politik yang dramatis itu dianggap belum mampu mendorong perubahan demokrasi secara substansial. Struktur kekuasaan Indonesia dianggap masih bersifat elitis (Törnquist, 2013). Pada masa regim Orde Baru Soeharto struktur kekuasaan dicirikan oleh dominasi “*one man show*”. Sedangkan pasca Orde Baru Soeharto, struktur kekuasaan semakin bersifat oligarkhi, yaitu didominasi dan dikendalikan oleh kekuatan kapital. Robison dan Hadiz (2004) menjelaskan bahwa kekuatan itu sesungguhnya adalah kekuatan oligarkhi lama yang merupakan kroni-kroni Soeharto, sebagaimana dikemukakan bahwa:

“Setelah kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998, oligarki tidak lantas berakhir, bahkan semakin meluas dan bersinergi dengan sistem politik demokrasi. Para oligark yang sebelumnya merupakan kroni Soeharto menyebar dan bermetamorfosa dalam wajah demokrasi melalui partai-partai politik yang merupakan sarana kendali atas kekuasaan yang dengan demikian juga akses pertahanan dan pemupukan kekayaan”.

---

<sup>2</sup> Hasil pemilihan Presiden secara Langsung 2014 yang diumumkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-JK meraih 53,13 persen, sementara pesaingnya, yaitu pasangan Prabowo-Hatta hanya meraih 48,85 persen (Tribunenew.com, diakses 6 November 2014).

Pada masa regim Orde Baru Soeharto, kalangan kekuatan kapital itu masih sangat tergantung pada kekuasaan birokrasi pemerintahan untuk memperoleh akses sumber-sumber ekonomi yang dikuasai negara. Namun, sejak reformasi politik telah memungkinkan kalangan kekuatan kapital ini menguasai pemerintahan dan dapat mengendalikan secara langsung sumber daya ekonomi itu (Fukuoka, 2012). Dalam struktur politik yang didominasi kekuatan modal, partai politik dan parlemen menjadi arena pertarungan bagi kekuatan-kekuatan sosial. Partai politik dan parlemen merupakan sarana untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, serta instrumen yang strategis untuk meningkatkan kekuatan ekonomi, yaitu melalui pemenangan tender atas proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran negara. Persaingan politik juga telah memicu meluasnya praktek-praktek penggunaan kekuatan uang (*money politics*), dan karena itu biaya politik-pun menjadi demikian mahal. Mietzner (2013, hal. 239) menjelaskan bahwa lemahnya sistem keuangan partai politik serta biaya persaingan politik yang tinggi itu telah menyebabkan partai-partai politik semakin tergantung pada para pemodal dalam pembiayaan kegiatan partai.

Dalam politik oligarkhi pasca Orde Baru Soeharto, kekuatan ekonomi telah menjadi *material-base* yang sangat berarti dalam meraih serta mempertahankan kekuasaan (*power*). Sehubungan dengan itu, perubahan politik sejak 1998 dicirikan oleh fenomena kecenderungan meningkatnya kalangan pengusaha, mereka yang menguasai kapital untuk memasuki dunia politik, menjadi pengurus partai serta menjadi anggota parlemen. Mengapa mereka berkepentingan untuk terlibat dalam politik? Bagi kalangan Strukturalist-Marxist melihat bahwa dorongan kalangan pemilik modal untuk terlibat dalam politik itu adalah kepentingan mereka untuk mempertahankan kelangsungan bisnis mereka. Dalam politik yang oligarkhi, regulasi (baca: kebijakan-kebijakan ekonomi) pada hakekatnya menjadi arena untuk menjamin kelangsungan proses akumulasi kapital. Apakah yang diharapkan dari liberalisasi ekonomi dalam struktur politik oligarkhi yang bersifat predator ini?

Reformasi politik juga telah mendorong tuntutan untuk mengakhiri sistem pemerintahan yang sentralistik. Kebijaksanaan desentralisasi baru yaitu otonomi daerah, yang dirumuskan di tengah perubahan politik merupakan instrumen yang diharapkan akan memperkuat atau memperdalam proses demokrasi di Indonesia. Pengesahan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi melalui UU No. 32/2004 memberikan kewenangan politik yang lebih besar bagi masyarakat di daerah dalam memacu pembangunan ekonomi di daerah<sup>3</sup>. Kalangan Liberal percaya bahwa otonomi daerah dan didukung oleh pelembagaan pemilihan kepala daerah secara langsung

---

<sup>3</sup> Kewenangan daerah itu termasuk menyederhanakan prosedur perizinan, menghapus peraturan dan pungutan yang berpotensi mengganggu atau memberatkan bagi aktivitas usaha, termasuk bagi pengembangan usaha kecil di daerah serta kewenangan dalam pembangunan infra-struktur di daerah. Kewenangan ini memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong daya tarik daerah bagi kegiatan investasi. (lihat: KPPOD dan Asia Foundation, *Tata Kelola Ekonomi Daerah*, 2011.)



oleh rakyat merupakan instrumen dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Apakah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah itu telah didukung oleh perubahan politik yang berarti dalam mendorong proses demokratisasi? Pelaksanaan otonomi daerah di sejumlah daerah, tanpa ditopang pelembagaan demokrasi dalam mewujudkan *good governance* hanya akan memicu maraknya praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan di daerah<sup>4</sup>. Penyalah-gunaan kekuasaan justru semakin menyebar seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang tidak didukung oleh kelembagaan politik yang demokratis. Kalangan Strukturalist-Marxist melihat meluasnya praktek-praktek penyalah-gunaan kekuasaan di daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah tak lepas dari perkembangan politik yang semakin olikarkhis. Sehubungan dengan ini, otonomi daerah dapat dipandang sebagai *politics of wealth defence*. Otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah justru telah membuka peluang bagi kalangan oligarch, orang kaya, kalangan pengusaha untuk mempertahankan kemakmuran mereka. Strategi untuk mempertahankan kemakmuran itu dilakukan menduduki atau mengendalikan jabatan-jabatan politik yang strategis dan bila memungkinkan dapat dilakukan dengan membangun dinasti politik di daerah. Sejumlah kasus penyalah-gunaan kekuasaan di daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah pada akhirnya akan membawa implikasi yang luas bagi ekonomi nasional.

Liberalisasi ekonomi tanpa didukung oleh penguatan demokrasi semakin menyuburkan praktek-praktek perburuan rente. Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi Indonesia dalam mewujudkan daya saing ekonominya, terutama dalam menjawab tantangan globalisasi ekonomi dewasa ini. Dilihat dari daya saing global, menurut World Economic Forum (WEF) Indonesia pada 2014-2015 menempati urutan ke-34 dari 144 negara. Peringkat ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya (2013-2014) yang mencapai peringkat ke-38.<sup>5</sup> Namun, peringkat daya saing ekonomi yang dicapai Indonesia itu masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan peringkat daya saing ekonomi negara-negara ASEAN lainnya, terutama Singapura, Malaysia dan Thailand. Akankah perubahan politik yang dihasilkan pemilu 2014 membawa perubahan yang berarti dalam memperkuat demokrasi Indonesia? Penguatan demokrasi merupakan tantangan bagi pemerintahan baru Jokowi-JK dalam membangun Indonesia Baru, yang bersih dari praktek-praktek penyalah-gunaan kekuasaan.

## ***Kesimpulan***

---

<sup>4</sup> Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengemukakan bahwa selama 2004-2012 sebanyak 277 kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) telah terlibat dalam kasus penyalah-gunaan kekuasaan. Penyalah-gunaan kekuasaan itu tidak hanya di kalangan birokrasi pemerintahan, tetapi juga di kalangan lembaga legislative. Sebanyak 16.267 anggota parlemen di daerah, dari jumlah itu sebanyak 2.533 terlibat dalam kasus penyalah-gunaan kekuasaan (Tempo.co., 29 Agustus 2012. Diakses pada 6 November 2014.

<sup>5</sup> Lihat: Bisnis.news.viva.co.id., 17 September 2014. Diakses pada 6 November 2014.

Pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional merupakan fenomena yang menyertai perubahan ekonomi-politik global sejak Perang Dingin berakhir. Meningkatnya pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional maupun trans-regional telah mendorong percepatan proses globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi membuka peluang tetapi sekaligus juga membawa tantangan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN telah memainkan peran yang aktif dalam pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional itu. Keterlibatan ASEAN dalam berbagai forum kerjasama ekonomi regional itu dapat dipandang sebagai strategi bagi ASEAN dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang tidak menentu. Kalangan pemimpin ASEAN menekankan pentingnya kolektivitas dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang tidak menentu. Keanggotaan ASEAN secara kolektif dalam berbagai forum kerjasama ekonomi regional itu diyakini akan lebih membawa manfaat daripada ditempuh secara individual. Kalangan pemimpin ASEAN semakin menyadari pentingnya integrasi ekonomi internal di kalangan negara-negara anggota ASEAN seiring dengan peran aktif ASEAN dalam pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional. Pembentukan ASEAN FTA pada awal 1990an hingga pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) yang hendak capai pada awal 2015 telah menjadi strategi bagi ASEAN dalam menyikapi globalisasi ekonomi. Pembentukan AEC upaya kolektif ASEAN dalam meningkatkan daya-saing ekonomi kawasan.

Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, ASEAN juga sangat berkepentingan dalam mewujudkan stabilitas politik dan keamanan kawasan. ASEAN telah berperan aktif dalam pembentukan berbagai forum kerjasama regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar di kawasan, seperti: China, India, Jepang dan Korea Selatan. Bahkan, pembentukan kerjasama ekonomi regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar itu tidak hanya dipicu oleh pertimbangan ekonomi tetapi juga pertimbangan politik. Berbagai forum kerjasama ekonomi yang digagas oleh ASEAN dengan melibatkan negara-negara besar itu sesungguhnya tidak hanya sekedar forum kerjasama ekonomi, tetapi juga diharapkan menjadi instrumen bagi ASEAN, terutama dalam mendukung terwujudnya stabilitas politik dan keamanan kawasan di Asia Tenggara.

Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang paling berpengaruh dan berperan aktif dalam mendorong pembentukan berbagai forum kerjasama ekonomi regional. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum kerjasama ekonomi regional telah membawa konsekuensi yang luas bagi Indonesia, termasuk untuk membangun komitmen di kalangan elit nasional dalam menempuh kebijakan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi telah menjadi sarana bagi Indonesia dalam menyikapi globalisasi ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang ditempuh Indonesia sejak pertengahan 1980-an semakin mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global

yang lebih luas. Namun, Indonesia tidak mampu menghadapi dampak dari integrasi ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global. Integrasi ekonomi global itu tidak hanya memicu peningkatan arus barang dan jasa, tetapi juga mendorong proses internasionalisasi kapital. Seiring dengan ekonomi Indonesia yang telah berubah, sebagai dampak dari globalisasi ekonomi, Indonesia sesungguhnya memerlukan pelembagaan ekonomi yang baru, yaitu pengelolaan ekonomi yang lebih transparan seiring dengan ekonominya yang telah berubah.

Namun, perubahan ekonomi Indonesia seiring dengan semakin terintegrasi ekonominya ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas itu tidak diikuti oleh perubahan politik yang berarti dalam menertibkan praktek-praktek perburuan ekonomi rente (*rent-seeking activities*) serta mewujudkan pengelolaan ekonomi yang transparan. Perubahan politik yang dramatis sejak 1998 masih belum mampu menertibkan perburuan rente yang berpotensi menjadi sumber penyalah-gunaan kekuasaan di tengah ekonomi Indonesia yang telah berubah. Kebijakan otonomi daerah yang diharapkan mendorong perubahan politik serta memperkuat demokrasi justru melembagakan perburuan ekonomi rente, dan karenanya menjadi sumber korupsi. Praktek-praktek korupsi yang semakin melembaga, semakin melemahkan daya saing ekonomi Indonesia. Perubahan politik untuk memperkuat demokrasi sangat diperlukan dalam menghadapi globalisasi ekonomi seiring dengan liberalisasi ekonomi yang telah ditempuh selama ini.

### ***Daftar Pustaka***

Cohn, Theodore H., *Global Political Economy*, New York: Longman, 2010.

Mietzner, Marcus, (2013) "Political Party Financing in Indonesia is a Recipe for Corruption", *Strategic Review*. Diunduh dari <http://www.sr-indonesia.com/in-the-journal/view/political-party-financing-in-indonesia-is-a-recipe-for-corruption>. Diakses pada 19 Mei 2015.

Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz, 2004, *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*, London dan New York: Routledge Curzon.

Soesastro, Hadi, "The Asia Pacific Region on the Threshold of the 21st Century: Trends and Goals", *The Indonesian Quarterly*, Vol. XXIII, (4), 1995.

-----, "Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua Itu" CSIS, *Working Paper Series 082*, March 2004.

Tomsa, Dirk, "The Indonesian Party System after the 2009 Elections: Toward Stability?" dalam Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (eds), *Problems of Democratization in Indonesia*, Singapura, ISEAS, 2010.

Törnquist, Olle, *Indonesian Democracy: From Stagnation to Transition*, Diunduh dari [http://www.newleftproject.org/index.php/site/article\\_comments/indonesian\\_democracy\\_from\\_stagnation\\_to\\_transformation](http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/indonesian_democracy_from_stagnation_to_transformation). Diakses pada 5 Juni 2015. Jam 08.04

## **BIODATA KONTRIBUTOR**

### **Aditya Haryo Wahyudi**

Aditya lahir di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1995. Seusai tamat SMA di Bakti Mulya 400, Aditya melanjutkan studinya di perguruan tinggi swasta, Universitas Pelita Harapan, jurusan Hubungan Internasional. Ketertarikannya terhadap ASEAN, membuat dirinya mengambil dan menekuni konsentrasi Studi ASEAN. Pada tahun 2015, Aditya sempat mendapatkan pengalaman untuk magang di Departemen Fungsi Sosial Budaya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Selama duduk di bangku kuliah, pria yang cukup ahli di bidang fotografi ini juga aktif di berkontribusi pada acara-acara Himpunan Mahasiswa Jurusan sebagai panitia.